

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan IV 2024 tercatat sebesar 1,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan capaian Triwulan III 2024 sebesar 1,98% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,57% (yoy). Walaupun demikian, realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rerata inflasi provinsi Kalimantan Selatan pada periode yang sama selama tiga tahun terakhir sebesar 3,99% (yoy).

Kelompok Pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau menjadi Kelompok dengan andil terbesar penyumbang Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan tersebut disumbang oleh meningkatnya harga komoditas terong, cabai merah dan telur ayam ras. Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga dan budaya. Secara spasial, seluruh kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi. Pada Desember 2024, kota IHK dengan inflasi tertinggi terjadi di Tanah Laut sebesar 1,01% (mtm), sementara Kotabaru mengalami inflasi terendah sebesar 0,07% (mtm).

Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi diperkirakan tertahan oleh menurunnya tarif listrik sejalan dengan kebijakan potongan tarif sebesar 50% bagi pengguna dengan daya 2.200 VA ke bawah yang berlaku pada bulan Januari – Februari 2025.

Mencermati perkembangan terkini, tekanan inflasi bulanan di Provinsi Kalimantan Selatan pada Januari 2025 diperkirakan lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Meningkatnya tekanan inflasi utamanya diperkirakan didorong oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau utamanya didorong oleh meningkatnya permintaan komoditas pangan seiring dimulainya implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perayaan Haul Guru Sekumpul. Lebih lanjut, perayaan Haul Guru Sekumpul juga berpotensi mendorong kenaikan tiket pesawat yang berdampak pada meningkatnya tekanan inflasi komoditas tarif angkutan udara.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

#### ◦ **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Kalimantan Selatan Oktober 2024**

Pada Oktober 2024, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 0,16% (mtm), meningkat dibanding September 2024 yang mengalami deflasi sebesar 0,07%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,08% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 1,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,98% (yoy). Kelompok Pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi Kelompok dengan andil terbesar penyumbang Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan tersebut disumbang oleh meningkatnya harga komoditas emas perhiasan seiring dengan tren peningkatan harga emas dunia. Selain itu, kelompok kesehatan turut menjadi penyumbang inflasi Oktober 2024, utamanya didorong oleh penyesuaian tarif rumah sakit di Tanjung. Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh kelompok makanan minuman dan tembakau, utamanya oleh komoditas cabai rawit dengan andil sebesar -0,04%

(mtm) seiring dengan tercukupinya pasokan dari luar Provinsi Kalimantan Selatan. Secara spasial, tiga dari lima kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi. Pada Oktober 2024, kota IHK dengan inflasi tertinggi terjadi di Tanjung sebesar 0,98% (mtm), sementara Kab. Tanah Laut mengalami deflasi sebesar 0,37% (mtm).

◦ **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Inflasi Kalimantan Selatan November 2024**

Pada November 2024, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 0,50% (mtm), meningkat dibanding Oktober 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,16%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,30% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 2,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,81% (yoy). Kelompok Pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau menjadi Kelompok dengan andil terbesar penyumbang Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan tersebut disumbang oleh meningkatnya harga komoditas ikan gabus, bawang merah dan daging ayam ras. Lebih lanjut, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turut menjadi penyumbang inflasi November 2024, didorong oleh harga komoditas emas perhiasan yang meningkat seiring dengan harga emas dunia. Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh kelompok transportasi utamanya disebabkan oleh penurunan tarif angkutan udara seiring dengan normalisasi permintaan karena tidak adanya HBKN dan periode liburan pada bulan laporan. Secara spasial, seluruh kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi. Pada November 2024, kota IHK dengan inflasi tertinggi terjadi di Tanah Laut sebesar 1,08% (mtm), sementara Kotabaru mengalami inflasi terendah sebesar 0,04% (mtm).

◦ **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Inflasi Kalimantan Selatan Desember 2024**

Pada Desember 2024, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 0,46% (mtm), menurun dibanding November 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,50%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,44% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 1,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,01% (yoy). Kelompok Pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau menjadi Kelompok dengan andil terbesar penyumbang Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan tersebut disumbang oleh meningkatnya harga komoditas terong, cabai merah dan telur ayam ras. Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga dan budaya. Secara spasial, seluruh kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi. Pada Desember 2024, kota IHK dengan inflasi tertinggi terjadi di Tanah Laut sebesar 1,01% (mtm), sementara Kotabaru mengalami inflasi terendah sebesar 0,07% (mtm).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

◦ **Periode Oktober 2024**

Berbagai forum koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan pada Oktober 2024 menekankan pada keberlanjutan penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah, Rapat Koordinasi dalam meningkatkan ketahanan pangan serta perluasan Kerjasama Antar Daerah.

Dalam rangka pengendalian inflasi secara berkelanjutan, TPID se-Kalimantan Selatan telah melakukan upaya untuk menjamin kecukupan pasokan pangan di berbagai daerah melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Upaya Mengendalikan Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga tingkat harga, hingga Oktober 2024 telah dilaksanakan operasi pasar/pasar murah sebanyak 500 kegiatan yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan selatan yang diselenggarakan melalui sinergi antar anggota TPID Kab/Kota serta Provinsi.

- Upaya Kelancaran Distribusi

Pelaksanaan Kerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam rangka prioritas angkutan logistik pangan serta pemberian subsidi ongkos angkut dalam rangka mendukung realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang dirangkaikan dengan penyaluran subsidi ongkos angkut (fasilitas distribusi pangan) sebagai upaya pengendalian harga.

- Upaya Ketersediaan Pasokan

Beberapa upaya pemenuhan kebutuhan pasokan di antaranya melalui peningkatan produksi di sisi hulu melalui penyaluran alsintan dan optimalisasi lahan rawa. Lebih lanjut, Perum Bulog telah telah menyalurkan beras SPHP oleh sebanyak 18.300 ton sepanjang tahun 2024.

- Upaya Komunikasi Efektif

Pada tanggal 22 Oktober 2024, telah dilaksanakan Rakorwil TPID se- Kalimantan yang berlokasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalimantan Barat. Adapun tema yang diangkat pada Rakorwil tersebut adalah “penajaman rancangan roadmap TPID 2025-2027 berdasarkan mekanisme hulu-hilir yang terintegrasi”

- **Periode November 2024**

Berbagai forum koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan pada November 2024 menekankan pada keberlanjutan penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah, Rapat Koordinasi dalam meningkatkan ketahanan pangan serta perluasan Kerjasama Antar Daerah. Dalam rangka pengendalian inflasi secara berkelanjutan, TPID se-Kalimantan Selatan telah melakukan upaya untuk menjamin kecukupan pasokan pangan di berbagai daerah melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Upaya Mengendalikan Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga tingkat harga, hingga November 2024 telah dilaksanakan operasi pasar/pasar murah sebanyak 501 kegiatan yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan selatan yang diselenggarakan melalui sinergi antar anggota TPID Kab/Kota serta Provinsi

- Upaya Kelancaran Distribusi

Pelaksanaan Kerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam rangka prioritas angkutan logistik pangan serta pemberian subsidi ongkos angkut dalam rangka mendukung realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang dirangkaikan dengan penyaluran subsidi ongkos angkut (fasilitas distribusi pangan) sebagai upaya pengendalian harga.

## Upaya Ketersediaan Pasokan

Beberapa upaya pemenuhan kebutuhan pasokan di antaranya melalui peningkatan produksi di sisi hulu melalui penyaluran alsintan dan optimalisasi lahan rawa. Lebih lanjut, Perum Bulog telah telah menyalurkan beras SPHP oleh sebanyak 19.631 ton sepanjang tahun 2024.

### ◦ Upaya Komunikasi Efektif

Pada tanggal 12 dan 13 November 2024, telah dilaksanakan Capacity Building TPID Prov. Kalimantan Selatan yang diselenggarakan di Jakarta dan dihadiri oleh seluruh anggota TPID Provinsi dan Kab/Kota se-Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, juga dilaksanakan HLM TPID di kab/kota lainnya.

### ◦ **Periode Desember 2024**

Berbagai forum koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan pada Desember 2024 menekankan pada keberlanjutan penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah, Rapat Koordinasi dalam meningkatkan ketahanan pangan serta perluasan Kerjasama Antar Daerah. Dalam rangka pengendalian inflasi secara berkelanjutan, TPID se-Kalimantan Selatan telah melakukan upaya untuk menjamin kecukupan pasokan pangan di berbagai daerah melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

### ◦ Upaya Mengendalikan Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga tingkat harga, hingga Desember 2024 telah dilaksanakan operasi pasar/pasar murah sebanyak 532 kegiatan yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan yang diselenggarakan melalui sinergi antar anggota TPID Kab/Kota serta Provinsi

### ◦ Upaya Kelancaran Distribusi

Pelaksanaan program prioritas angkutan logistik pangan oleh Dinas Perhubungan serta pemberian dukungan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) pada realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga sampai ke tingkat konsumen akhir.

### ◦ Upaya Ketersediaan Pasokan

Beberapa upaya pemenuhan kebutuhan pasokan di antaranya melalui tindaklanjut hasil KAD dengan beberapa daerah sentra produksi serta upaya peningkatan produksi di sisi hulu melalui penyaluran alsintan dan optimalisasi lahan rawa. Guna mendukung ketersediaan beras, Perum Bulog telah telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 21.345 ton sepanjang tahun 2024.

### ◦ Upaya Komunikasi Efektif

Pada tanggal 29 Desember 2024, telah dilaksanakan *High Level Meeting* (HLM) TPID Provinsi Kalimantan Selatan dengan tema ‘Strategi Pengendalian Inflasi Tahun 2025’. Kegiatan yang dipimpin oleh Gubernur Kalsel, Bpk. H. Muhidin ini menghasilkan beberapa rencana kebijakan pengendalian inflasi tahun 2025, seperti penyusunan *Roadmap* TPID 2025-2027, Optimalisasi BUMD Pangan serta upaya peningkatan produksi komoditas pangan strategis.

## 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi kebijakan yang semakin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai stakeholders strategis di daerah. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan didukung penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah terutama di Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah pengendalian inflasi secara rutin dilakukan antara lain melalui pelaksanaan rapat koordinasi (rakor), dukungan penyelenggaraan operasi pasar atau pasar murah, serta inovasi budidaya tanaman pangan seperti perluasan implementasi program padi apung, cabai apung, program sistem integrasi kelapa sawit-sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma (SISKA KUINTIP) yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemanfaatan pupuk berbahan dasar batu bara sebagai salah satu alternatif penggunaan pupuk impor yang harganya terus meningkat, serta penyaluran penggunaan bibit unggul yang lebih tahan organisme pengganggu tanaman (OPT). Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama seluruh anggota TPID Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat respons dan sinergi kebijakan guna memastikan terkendalinya ekspektasi masyarakat dan inflasi sehingga inflasi tetap terjaga dalam kisaran  $2,5 \pm 1\%$ .

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Melaksanakan pemantauan dan peninjauan pasar secara berkala untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kalimantan Selatan.
- Memperkuat pengawasan barang kebutuhan pokok dengan instansi terkait khususnya Satgas Pangan.
- Memberikan skala prioritas bagi angkutan untuk barang kebutuhan pokok pada setiap SPBU untuk kelancaran distribusi.
- Melaksanakan Kerjasama Antar Daerah untuk menjaga kestabilan pasokan pangan dalam rangka Pengendalian Inflasi.
- Melaksanakan Rapat Koordinasi TPID Provinsi maupun dengan TPID Kabupaten/Kota terkait langkah - langkah dalam pengendalian inflasi daerah.
- Optimalisasi kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah TPID Provinsi Kalimantan Selatan.
- Melaksanakan kegiatan menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Melaksanakan Gerakan Pangan Murah.
- Melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
- Melakukan intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas (Padi Apung).
- Dibutuhkan sinergis dan kolaborasi seluruh anggota TPID dalam mengantisipasi dampak El nino.
- Pelaksanaan High Level Meeting (HLM).
- Pelaksanaan Capacity Building (CB).
- Menambahkan pasokan beras bekerjasama dengan Bulog.
- Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pada seluruh Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Koordinasi Pengembangan Divisi Pangan PT. Bangun Banua untuk menjadi salah satu penyedia kebutuhan pangan di Kalimantan Selatan untuk pengendalian inflasi.
- Mengantisipasi Kenaikan Harga Pangan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
- Koordinasi rencana kerjasama divisi pangan PT. Bangun Banua dengan Pengelola Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Pengendalian Inflasi
- Melaksanakan MoU antara PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan dengan Lumbung

Pangan Masyarakat (LPM “ maju bersama” yang berada di kabupaten Banjar dan LPM “Karya Bersama “ yang berada di Kabupaten Barito Kuala) dalam hal Penambahan modal pembelian dan pengelolaan gabah petani

- Meningkatkan program pemerintah tentang cetak sawah rakyat secara swakelola sebagai upaya penambahan produksi pangan (beras) melalui peningkatan indeks Pertanaman dan Produktivitas dari lahan sawah eksisting
- Pengembangan Kerjasama pola distribusi daging ayam ras dengan Bulog dan Pinsar
- Melaksanakan Program Desa Mandiri Pangan (DeMaPan) berupa penanganan kerawanan pangan masyarakat
- Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat berupa bantuan penitipan gabah di lumbung - lumbung pangan masyarakat
- Rencana pembuatan MoU Pengendalian Pasokan dan harga Ayam Potong dengan Bulog dan Kanwil Pinsar Kalsel
- Melaksanakan sidak pasar menjelang Natal dan Tahun Baru